DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan III PenyelesaianSengketa Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.

Effendie, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, cet. 1,Edisi kedua, (Bandung: Alumni,1993).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-UndangPokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Cet. 3, (Jakarta:Djambatan, 2005).

Harsono, Boedi,*Hukum Agraria Agraria Sejarah Pembentukan undang-undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta,2008.

Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006).

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra

Aditya Bakti.Bandung.

Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cet.1. (Bandung: Alumni, 1991).

Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut PandangPraktisi Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Juni 1994).

Perangin, Effendi,*Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Cet. 2, (Jakarta:CV. Rajawali, 1990).

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1985).

Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*,Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sutedi, Adrian, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak AtasTanah*, (Jakarta: Cipta Jaya, 2006).

Waluyo, Bambang,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,1991.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

3. Wawancara

Aris w, wawancara,Kepala Supseksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal 25 mei 2016.

4. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

www.hukumonline.com